

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NO.06 TAHUN 2017 TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**YODI SUNDANA**  
**11424101258**

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

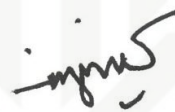
Skripsi dengan Judul “ TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Pada Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)”, yang ditulis oleh:

Nama : **Yodi Sundana**  
NIM : 11424101258  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Jumadil1442 H  
27 Januari 2021 M

Pembimbing Skripsi



**RAHMAN ALWI, M.Ag.**  
NIP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Yodi Sundana**  
 NIM : 11424101258  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, Lc., MA**

Penguji I  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Penguji II  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag**

(NIP. 19580712 196803 1 005)



## ABSTRAK

**Yodi Sundana (2021): Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)**

Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi dari Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum nasional sampai keperangkat hukum daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Penelitian ini adalah penelitian bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan di daerah kabupaten rokan hilir. Adapun alasan penulis mengambil tempat penelitian disini adalah karena di daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang tempat pembuangan akhir masih bertumpuk dimana-mana. metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pengelolaan data tersebut peneliti mengetahui dan memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada maka menulis meninjau dengan padangan fiqh siyasah.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahawasanya sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan) Dalam Pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bagan Sinembah dalam pandangan islam *Khailfah* pemimpin yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

**KataKunci: *Fiqh Siyasah*, Pelaksanaan ,Pengelolaan Sampah.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)**". Penyusunan skripsi ini merupakan langkah awal untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, "Bapak Amri" dan "Ibu Asra Ritonga". Terima kasih atas do'a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini. Adik saya Raihanul Qalbi terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, sebagai rektor UIN Suska Riau, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Drs. Hajar M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rahman Alwi M.A selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing proposal yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai
7. Bapak Rahman Alwi M.A selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Untuk Sahabat dan Teman-Teman saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu., Beserta seluruh Sahabat dan Teman saya lainnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi.

Jazakumullah khairan katsiron, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 19 Maret 2021

Penulis

Yodi Sundana

NIM : 11424101258



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan masalah .....	15
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika penulisan.....	24
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah .....	25
B. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah .....	26
C. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	26
D. Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	27
E. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
F. JumlahPenduduk Menurut Mata Pencaharian .....	29
G. Jumlah Sarana Pendidikan.....	30
H. Jumlah Rumah Ibadah .....	30
I. Struktur Pemerintahan.....	31
<b>BAB III    KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori.....	35
1. Fiqh Siyasah .....	35
a. Pengertian Fiqh Siyasah .....	35
b. Objek kajian fiqh siyasah .....	36
2. Hak-Hak Kepala Negara .....	41
3. Kewajiban Kepala Negara .....	42
4. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 .....	47
B. Tinjauan Pustaka .....	58



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Pada Kecamatan Bagan Sinembah.....	60
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ..	70

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	26
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	27
Tabel 4.3.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	28
Tabel 3.4.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	29
Tabel III.5.	Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	30
Tabel 3.6.	Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Bagan Sinembah .....	31
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Terhadap Kondisi Kebersihan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terhadap Pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2017 .....	64
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah dalam Pembayaran Retribusi Kebersihan .....	65
Tabel IV. 3	Tanggapan Responden Terhadap Bagaimana .....Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bagan Sinembah Daerah Kab. Rokan Hilir .....	67
Tabel IV. 5	Tanggapan Responden Terhadap Partisipasi .....Masyarakat dalam Pembinaan atau Penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir .....	68

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pengelolaan pelayanan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum nasional sampai keperangkat hukum daerah yang berkaitan dengan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.<sup>1</sup>

Selanjutnya dalam penyelenggaraan negara, Peraturan Daerah (Perda) ditempatkan sebagai bagian integral dari peraturan nasional, artinya Perda yang tersebar diseluruh pelosok tanah air dikembangkan atas dasar tetap terjaga dan terpelihara keutuhan negara dengan tidak terlupakan terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Suksesnya suatu Perda atau perangkat hukum lainnya, dalam mengimplementasikannya sudah barang tentu tidak akan terlepas dari peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari pelaksanaan peraturan maupun objek pembangunan, sudah sewajarnya turut berperan serta dalam

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Pertama, h. 1.

<sup>2</sup> Y.W. Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-2, h.12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mensukseskan pelaksanaan segala peraturan maupun segala program pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah Daerah didalam menjalankan peraturan termasuk menjalankan pembangunan khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan harus senantiasa mengikutsertakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bintoro Cokro Amidjojo, bahwa tugas pelaksanaan Perda dan menjaga kebersihan lingkungan tidak mungkin dapat terlaksana oleh Pemerintah Daerah sendiri, melainkan diperlukan suatu usaha untuk melibatkan masyarakat”.<sup>3</sup>

Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang memiliki legitimasi sudah barang tentu memikul tugas dan tanggung jawab. Hal tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai program-program Pemerintah Daerah, seperti program pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Sebagaimana usaha Pemerintah Daerah untuk membangkitkan peran serta masyarakat dalam menjalankan Perda agar turut menjaga kebersihan lingkungan di daerah khususnya di Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun usaha tersebut tergambar dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, di Kecamatan Bagan Sinembah.

Pengamatan penulis, kesadaran masyarakat khususnya di Kelurahan Bagan Batu sebagai salah satu Kecamatan Sinembah di Kabupaten Rokan

---

<sup>3</sup> Bintoro Cokro Amidjojo, *Teori Strategis Pembangunan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1993), h. 48.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hilir masih rendah, beberapa diantaranya partisipasi dalam kebersihan tentang pengelolaan sampah, serta partisipasi dalam gotong-royong kebersihan yang dihimbau pemerintah, partisipasi dalam membuang sampah pada waktu tempat yang sudah disediakan.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”<sup>4</sup> Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Pada alenia ke-IV Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Pengamalan pasal dalam konstitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini

(1) <sup>4</sup> Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat

<sup>5</sup> Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alenia ke IV

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut salah satunya adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat . membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin secara eksplisit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>6</sup>

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, hingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing seperti Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 H ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulan sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (rause), dan pendauran ulang sampah (recycle) agar volume sampah tidak terus bertambah.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2(dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.<sup>8</sup>

Melalui Peraturan daerah pasal 4 bab III Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah ditempat pemrosesan Akhir.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Th 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*

<sup>9</sup> Peraturan daerah pasal 4 bab III *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga,<sup>10</sup> Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana kebijakan pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017 sistem pengelolaan sampah diatur dalam bab III yang berbunyi “penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. pemilahan dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. Pemilahan sampah dilakukan

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017, *Tentang Pengelolaan Sampah*, rokan hilir, pasal 6



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan menyediakan fasilitas tempat organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya.<sup>11</sup>

Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir masih terbatas pada sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah dan akhirnya dibuang ke tempat Pembuangan Akhir. Fungsi tempat pembuangan akhir semestinya bukan hanya merupakan tempat pembuangan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih.

Pada umumnya sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jika kita menganggap bahwa sampah adalah sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, tentu saja sampah tersebut tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu usaha yang baik. Sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik.

Salah satu upaya pemanfaatan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik dengan penekanan pada proses pengkomposan. Pengkomposan merupakan suatu teknik pengelolaan limbah padat yang

---

<sup>11</sup> Ibid, pasal 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengandung bahan organik *biodegradable* (dapat diuraikan mikroorganisme). Selain menjadi pupuk organik, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zat-zat hara lain.

Untuk mengatasi permasalahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanangan sampah sebagaimana dalam pasal 20 mengenai pembatasan, pendaurulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah, pemerintah membentuk lembaga pengelola persampahan di tingkat rumah tangga , tingkat rukun warga, tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan.

Pemerintah juga diwajibkan menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja, penyediaan TPS, TPST, dan TPA harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan penyediaan TPS, TPST dan TPA harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir , hal ini tertuang di dalam Pasal 27.<sup>12</sup> Dalam pelaksanaan pengelolaan, kewajiban pemerintah juga dijelaskan dalam pasal 16 yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib melakukan Pemeliharaan, Pengembangan, Penyediaan sarana, melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah di TPS, TPST, dan TPA”. Dan dalam pasal 17 juga menjelaskan bahwa setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Ibid*, pasal (27)

<sup>13</sup> *Ibid*, pasal 27, 16, dan 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (2) yang berbunyi “bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan menyehatkan memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat menyebarkan penyakit menular. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 pada pasal 58 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah akan dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

Berdasarkan pengamatan di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir bahwa total produksi sampah yang dihasilkan di Kecamatan Bagan Sinemba adalah kurang lebih 2 ton/hari. Jumlah sampah terangkut oleh Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung sekitar 1,5 ton/hari menggunakan 2 armada truk yang dikerahkan oleh pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir , dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Perbatasan Riau-Sumatera Utara. Truck sampah yang mengangkut sampah masuk ke Tempat Pembuangan Akhir. .

Namun pengelolaan sampah di TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan karena setelah sampah dibuang oleh truk pengangkut sampah di lokasi TPA kemudian sampah dibiarkan saja menumpuk yang mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di daerah TPA tanpa ada pengolahan akhir (daur ulang) .

Hal ini memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung yang disebabkan pencemaran tersebut bagi penduduk dilapangan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah bahaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan karena terhalang timbunan sampah.

Dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal.

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum.
2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>14</sup> Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat

<sup>14</sup> Rapung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.

Dalam *Fiqh Siyasa* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-Nisa : 59)

Abdul Hamid Muttawalli membagi ulil amri dalam dua golongan yaitu ulil amri keagamaan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (mufti), dan ulil amri keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif Fachrur Razi berpendapat bahwa ulil amri adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, dalam *Fiqh Siyasa Dusturiyyah* permasalahan ini termasuk dalam bagian Bidang *Siyasa Tasri’iyah* yang mana disebutkan didalamnya adalah *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang berarti perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana,2003),hlm 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memimpin atau mengatur suatu masyarakat Indonesia yang heterogen dan bervariasi diperlukan adanya sosok seorang pemimpin yang adil supaya dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (An-nisa ayat 58)

Pengertian dari *fiqh siyasah* ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>16</sup>. *Fiqh Siyasah* dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat<sup>17</sup>.
2. *Fiqh Siyasah Ma'liyah* yaitu, hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.
3. *Fiqh Siyasah Dauliyah* yaitu, pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hlm. 40

<sup>17</sup> *Ibid*. hlm. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>18</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Berlaku adil
2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad
3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan kemaslahatan umum
6. Harus dari suku Quraisy.

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan Negaranya juga harus berdasarkan:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50.

<sup>19</sup> Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 9.

<sup>20</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah
2. Perencanaan dalam pembangunan
3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
5. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
6. Keadilan tata usah/administrasi Negara
7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)”

## B. Batasan Masalah

Agar penelitin ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini dibatasi pengelolaan sampah oleh dinas kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah tahun 2020 berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 06 tahun 2017 di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap pengelolaan sampah yang ada di daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

### E. Metode Penelitian

Ditinjau dari segi tempat dilaksanakannya penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data lapangan dan dibantu dari sumber-sumber kepustakaan.<sup>21</sup>

Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*). Yakni dengan melalui penelitian :

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan di daerah kabupaten rokan hilir. Adapun alasan penulis mengambil tempat penelitian disini adalah karena di daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang tempat pembuangan akhir masih bertumpuk dimana-mana.

### 2. Subjek dan objek penelitian

#### a. Subjek

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Dinas kebersihan didaerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

#### b. Objek

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal yang dianggap perlu.<sup>22</sup> Oleh karena

<sup>21</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h.19

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu objek sasaran untuk melakukan penelitian ini adalah Pelaksanaa Peraturan Daerah( PERDA) No.6 Tahun 2017 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Berikut ini penjelasan Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah yang berjumlah 20 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>23</sup> Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah non probability sampling, non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, snowball.<sup>24</sup>

Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*.

<sup>23</sup> Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996), h.44

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik purposive sampling yaitu teknik yang berdasarkan pada cirri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan cirri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 10 orang yang berkatan data untuk penelitian, penulis mengambil sampel tersebut karena sesuai dengan teknik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu teknik *Purposive Sampling*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.<sup>25</sup> Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kreadibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :<sup>26</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.14

<sup>26</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h.240

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden.

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang pengelolaan sampah dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya *interviewer* didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh interviewer.

#### b. Angket,

Angket yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis dengan memberi jawaban alternative setiap pertanyaan kepada petugas kebersihan dan masyarakat serta yang berkaitan dengan penelitian skripsi, kemudian disebarkan kepada responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>27</sup> Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang sedang di obsevasi secara aktif.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

**5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data

---

<sup>27</sup> Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekontruksi data, adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, berurutan dan sistematis.<sup>28</sup>
- c. Sistematis data, adalah menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>29</sup>

## 6. Analisis Data

Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>30</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), h. 248.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data di peroleh, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat dimengerti. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Dengan demikian analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti atas suatu gejala yuridis atau cara untuk menentukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan, dalam menganalisis dan digunakan kerangka berpikir secara Deduktif.

Metode Deduktif yaitu suatu cara berpikir yang terangkat dari pengetahuan umum yang bertitik tolak pada pengetahuan umum itu, lalu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus suatu hal atas kasus. Penulis maksud ini yaitu mula-mula penulis menggambarkan kejadian pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di daerah kabupaten rokan hilir. Keadaan yang nyata dalam penelitian dilapangan secara global lalu dibandingkan dengan peraturan yang telah ada yang penulis cari dari hasil perpustakaan yang kemudian dari gambaran yang tadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menerangkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian Teori Mengenai Fiqh Siyasah Dan Pengelolaan Sampah Di Daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Pada bab ini berisikan pengertian fiqih dan ruang lingkup fiqih siyasah dan bagaimana pengelolaan sampah.

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir serta gambaran umum dinas Kebersihan dan metode pengelolaan sampah di dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peraturan Kabupaten Rokan Hilir nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak 180 Km dari kota kabupaten yang merupakan Jalan lintas Sumatera dan mempunyai julukan kota sawit. berdirinya kecamatan Bagan Sinembah diawali dengan masuknya pola perkebunan oleh PT Perkebunan Nusantara, yang diprakarsai oleh Wan Muhammad Noor setelah bertemu dengan presiden Soeharto saat meresmikan pabrik kelapa sawit Torgamba pada tahun 1984, setelah persetujuan di dapat dari presiden, maka penghulu Bagan Sinembah dahulu wan Muhammad Noor membuat kesepakatan dengan dengan manajer Torgamba, Anton Hasibuan, yang mengatakan bahwa 20 persen diberi untuk masyarakat lokal dan 80 persen untuk transmigrasi yang didatangkan dari pulau jawa, dari kesepakatan itu maka dilakukanlah pematangan lahan yang dilanjutkan dengan penanaman, sehingga pada tahun 1987 para transmigrasi mulai masuk ke wilayah Bagan Sinembah dan tersebar ke beberapa tempat.<sup>31</sup>

Melihat mulai ramainya penduduk Bagan Sinembah yang pada waktu itu masih masuk kecamatan Kubu, maka para pelaku sejarah mengusulkan untuk dibentuknya Kepenghuluan Bagan Sinembah menjadi Kecamatan Bagan Sinembah. setelah masuknya transmigrasi Bagan sinembah yang dulu bernama Jasinombah ini jadi ramai, maka pada tanggal

<sup>31</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

04 Januari 1995 diresmikan menjadi Kecamatan Bagan Sinembah, dan di pimpin oleh Wan Ahmad Syaiful sebagai camat pertama.<sup>32</sup>

## B. Letak Geografis Kecamatan Bagan Sinembah

Kecamatan Bagan Sinembah berada di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai luas 141.225 Ha yang terdiri dari 34 Desa dengan jumlah penduduk 141794 jiwa yang terdiri dari 35021 kepala keluarga (KK). Adapun batas –batas wilayah dari Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1.	Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kecamatan Pujud
2.	Sebelah utara	: berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan kubu <sup>33</sup>
2.	Sebelah Barat	: berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
3.	Sebelah Timur	: berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako

## C. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari jenis kelaminnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	JenisKelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	Laki – laki	66.958	50.78
2.	Perempuan	64.888	49.22
Jumlah		131. 846	100

Sumber : *Kantor Camat Bagan Sinembah*

<sup>32</sup> *Dokumentasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020*

<sup>33</sup> *Dokumentasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin laki – laki dengan jumlah 66.958 orang (50.78 %) sedangkan mereka yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 64.888 orang (49.22 %). Jadi dari data yang diperoleh menunjukkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki lebih dominan dibandingkan perempuan.<sup>34</sup>

#### D. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia. Kebebasan beragama dinegara Republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 dalam pasal 29. Sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antarumat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampur adukan kepercayaan.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah adalah beragama Islam. Walaupun Islam sebagai mayoritas, tidak ada penekanan atau pemaksaan dari agama yang mayoritas ke agama yang minoritas. Hal ini telah membuktikan mantapnya toleransi umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta mengamalkan pancasila. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	Jenis Agama	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Islam	93.418	69,77
2	Khatolik	19.210	14,37
3	Protestan	20.120	15,02
4	Hindu	30	0,02
5	Budha	1.119	0,83
Jumlah		133.897	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

<sup>34</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Bagan Sinembah mayoritas yaitu 93.418 Orang (69,77%) menganut agama Islam, sedangkan agama Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha menjadi agama minoritas yang dianut oleh penduduknya.<sup>35</sup>

### E. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari tingkat Pendidikan masing – masing dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	17.090	15,35
2.	Tidak Tamat SD	8.929	8,02
3.	Tamat SD	13.855	12,44
4.	Tamat SLTP/Sederajat	22.342	20,05
5	Tamat SMU/ sederajat	40.575	36,42
6	Tamat / Akademi	1.922	1,72
7	Tamat Perguruan Tinggi	3.414	3,07
8	Buta Huruf	3272	2,93
Jumlah		111399	100

Sumber: Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah tamatan SMA atau SLTA berjumlah 40.575 Orang atau 15,35% kemudian disusul dengan penduduk yang tamat SLTP sebanyak 22.342 orang 20,05 % sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan akademi yaitu 1.922 orang 1,72 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Bagan Sinembah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

<sup>36</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

## F. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya mempunyai mata pencapaian petani kelapa sawit. Karena disebabkan pertanian yang mengizinkan untuk bertani kelapa sawit, kemudian waktu luang tersebut digunakan dengan kerja sambilan atau sampingan seperti, berdagang, tukang dan jasa. Untuk lebih jelasnya mata pencapaian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah dapat Dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	Mata Pencapaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani	21.946	62,34
2.	Nelayan	-	0
3	Pengerajin	100	0,28
4	Pengusaha	1.411	4,00
5	BuruhBangunan	1.623	4,61
6	Pengangkutan	1.291	3,67
7	PNS	371	1,05
8	ABRI	56	0,16
9	Pensiunan ABRI	165	0,47
10	Peternak	896	2,55
11	Lain – lain	7.346	20,87
Jumlah		35205	100

Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencapaian penduduk Kecamatan Bagan Sinembah pada umumnya adalah Petani yaitu dengan jumlah 21.946 Orang dengan persentase 62,34%. Dan mata pencapaian yang paling sedikit di miliki oleh masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yaitu ABRI yaitu 56 orang dengan persentase 0,16%.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

## G. Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan berkembang baik di Kecamatan Bagan Sinembah. pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung – gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai perguruan tinggi. untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	TK	29	18,47
2	SD	74	47,13
3	SLTP	36	22,93
4	SLTA	15	9,55
5	Perguruan tinggi / akademik	3	1,92
<b>Jumlah</b>		<b>157</b>	<b>100</b>

Sumber: *Kantor Camat Bagan Sinembah*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah cukup memadai dan dengan jumlah 157 unit sarana pendidikan. jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD yaitu 74 unit dengan persentase 47,13 % sedangkan sarana yang paling sedikit yaitu perguruan tinggi yaitu 3 unit dengan persentase 1,92 %.<sup>38</sup>

## H. Jumlah Rumah Ibadah

Untuk menjalankan perintah Agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. dimana juga tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan

<sup>38</sup> *Dokumentasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesan–pesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat.

Dari 5 (lima) agama yang di anut masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah yang disebutkan sebelumnya semuanya memiliki rumah ibadah, sebagaimana bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6. Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Bagan Sinembah**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah (Buah)	Persentase (%)
1	Mesjid	135	34,26
2	Surau / Mushollah	132	33,50
3	Gereja	123	31,22
4	Wihara	2	0,51
5	Pura	2	0,51
Jumlah		394	100

Sumber : *Kantor Camat Bagan Sinembah*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) dari 5 (lima) agama yang di anut oleh penduduk Kecamatan Bagan Sinembah yaitu Mesjid yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 135 unit dengan persentase 34,26 % dan musholla yang memiliki tempat peribadatan umat muslim dengan jumlah 132 unit dengan persentase 33,50% sedangkan yang paling sedikit jumlah tempat peribadatan Agama hindu yaitu pura 2 unit dengan persentase 0,51% dan agama budha yaitu wihara 2 unit dengan jumlah persentase 0,51%.<sup>39</sup>

## I. Struktur Pemerintahan

Tugas – tugas pemerintah pada umumnya adalah melayani berbagai kepentingan (penduduk) dalam berbagai segi kehidupan mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, kesehatan, kependudukan dan sebagainya.

<sup>39</sup> *Dokumentasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020*

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 34 Desa, sebagai lembaga sosial milik pemerintah harus memberikan sumbangan yang besar dalam welfare state sesuai dengan amanah pembukaan UUD 1945 Bab empat:..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....” untuk melihat struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah<sup>40</sup>



Sumber : Kantor Camat Bagan Sinembah

<sup>40</sup> Dokumetasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menegaskan pola dan tata pembagian serta hubungan kerja pada unsur – unsur organisasi pemerintah Kecamatan, tugas dan fungsi unit kerja struktur organisasi pemerintahan Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kecamatan Bagan Sinembah merupakan salah satu kecamatan induk saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009, berbatasan dengan Kecamatan Pujud, Bangko Pusako, Simpang Kanan, dan Kubu, selain itu juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara.

Luas Kecamatan Bagan Sinembah 847,35 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,54 persen dari wilayah Rokan Hilir, dan memiliki 5 kelurahan yaitu, dengan kepadatan penduduk 133,21 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah begitu pesat di karenakan banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, sedangkan sebahagian besar wilayah Kecamatan Bagan Sinembah adalah perkebunan, karena pertumbuhan penduduk yang begitu besar menuntut adanya ketersediaan lapangan untuk tempat tinggal atau pemukiman, memperluas usahanya dan lain-lain. Sementara di Kecamatan Bagan Sinembah ketersediaan tentang pengelolaan sampah sangat minim, dimana warga asli Kecamatan Bagan Sinembah pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan masih terbatas pada sistem 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan) timbulnya permasalahan ini tidak lepas peran masyarakat dan juga pemerintahan daerah. Dengan demikian tidak menjadi suatu hal yang

baru jika di daerah ini terdapat banyak masalah pembuangan sampah dan pengelolaan sampah, masalah kurangnya penegakan hukum di Kabupaten Rokan Hilir.<sup>41</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> *Dokumentasi Kecamatan Bagan Sinembah 2020*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Fiqh Siyasah

###### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” fiqh secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian dan pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil ( terperinci, yang dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alquran dan sunnah).

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan membuat kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.

**b. Objek kajian fiqh siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al Mawardi, termasuk di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam-Sultaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kekuasaan pemerintah tentang:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- 4) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- 5) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu

- 1) *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan).
- 2) *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).
- 3) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- 4) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Abd Al-Wahhab didalam kitabnya yang berjudul *al-Syar'iah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- 1) *Siyasah Qadha'iyyah* (Peradilan).
- 2) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Internasional).
- 3) Keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy Malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang- undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang- undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).<sup>42</sup>

Adapun objek kajian *fiqh siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah*

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maliyah (politik ekonomi)*, di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga *siyasah* yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama Khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>43</sup>

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an.

<sup>43</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsept.html>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendaikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing , tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*.<sup>44</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>45</sup>

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h.53

<sup>45</sup> *Ibid.* h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kajian tentang konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya; parlementer

Kajian-kajian di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan.

Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sacral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'at*. Adapun yang berkaitan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi* disebut sebagai *siyasah taufidiyah*<sup>46</sup>

## 2. Hak-Hak Kepala Negara

Apabila kaum muslimin telah menyetujui seseorang sebagai kepala negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniyaan mereka serta melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umatnya, maka ia mempunyai Hak-hak tertentu dari kewajiban-kewajiban rakyatnya, sebagai hubungan timbal balik, kewajiban rakyat atas kepala negara adalah taat, patuh dan membantu kepadanya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat.

Hal ini kemudian ditegaskan Al-Mawardi bahwa apabila seseorang kepala negara telah menunaikan hak-hak yang tercakup dalam 10 kewajiban kepala negara, maka sendirinya dia mempunyai dua hak atas umatnya.

1. Rakyat wajib taat kepadanya
2. Partisipasi Masyarakat

Kepala Negara memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang ia laksanakan. Hak tersebut adalah, seluruh rakyat wajib taat dan patuh kepadanya, hak mendapatkan bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak memperoleh biaya hidup untuk dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi tanggungannya secara patut.

---

<sup>46</sup> Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Kewajiban Kepala Negara

Kewajiban kepala negara dari sudut pandang tujuan negara dan syari'at yang melekat pada kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi negara. Seorang kepala negara memiliki kewajiban menegakkan dan melaksanakan tujuan negara itu sendiri. Kewajiban-kewajiban negara dalam hukum islam meliputi:

- a. Melaksanakan penertiban (Law and order) untuk menapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Kepala negara harus melaksanakan penertiban. Dalam posisi demikian, dapat dikatakan bahwa kepala negara bertindak sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
- c. Pertahanan hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
- d. Menegakkan keadilan, keadilan harus ditegakkan pertama kali oleh kepala negara. Pejabat-pejabat negara juga harus berbuat adil mengikuti sikap adil yang dicontohkan oleh kepala negara penegakkan keadilan harus dimulai dan dicontohkan oleh badan-badan pengadilan.

#### Dasar Hukum Siyasah Dustariyah

Berikut ini adalah dasar hukum *siyasah dusturiyah* :

- a. Al-qur'an

Al-qur'an, adalah sumber pokok aturan islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam. Para tokoh-tokoh muslim sumber banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>47</sup> Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka dia antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa Ayat 29)<sup>48</sup>

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),h. 273.

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah, QS.An-nisa ayat 29* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an,1971).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>49</sup> Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

*Artinya: “Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud No. 2241).*

c. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.<sup>50</sup> Adapun dalil al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni :

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada*

<sup>49</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).h.53

<sup>50</sup> *Ibid*.h.54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa : 59)<sup>51</sup>*

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>52</sup> Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu :

1) *Qiyas al-aulawi*

*Qiyas al-aulawi* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang

<sup>51</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 59* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).

<sup>52</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.<sup>53</sup>

2) *Qiyas al-mushawi*

*Qiyas al-mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan.<sup>54</sup> Ada ulama yang berpendapat seperti ini, "yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya".

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa. "Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna padanash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah". Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma'na al-asal*.

<sup>53</sup> Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, h. 350.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

3) *Qiyas al-adna*

*Qiyas al-adna* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar- risalah*, Imam Syafi'i berkata, "sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya."

Menurut imam ar-Riqzi, Imam Syafi'i telah membagi *qiyas* jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni *qiyas al ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib asy-syafi'i* ia menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah dari pada *illat* pada hukum asal.<sup>55</sup>

**3. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017**

a. Pengelolaan Sampah

1) Definisi Pengelolaan Sampah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

<sup>55</sup> *Ibid*, h.356

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penenganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah No 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.<sup>56</sup> Jadi mengacu dari penjelasan ini sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak dipakai dan tidak dibutuhkan atau bahkan tidak disenangi lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan sampah. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut:

- a) Adanya sesuatu benda atau bahan padat.
- b) Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia.
- c) Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi.

<sup>56</sup> Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kabupaten rokan hilir, pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu:

- a) Sampah alam yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- b) Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi.
- c) Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia (pengguna barang), dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah- sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sampah Industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses- proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang besar dapat dikatakan sebagai limbah.

Sampah berdasarkan sifatnya, ada dua macam, yaitu Organik dan Anorganik, yaitu :

- a) Sampah Organik, adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b) Sampah Anorganik, adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik, wadah pembungkus makanan, botol, dan gelas bekas minuman, kaleng.

Sampah berdasarkan bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk padat dan cair, berikut penjelasannya:

- a) Sampah padat , adalah segala bahan bungkus selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas dan lain-lain. Menurut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

- b) Sampah cair, adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.
- c) Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 06 Tahun 2017

Sampah (*refuse*) sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi yang bukan biologis karena *human waste* tidak termasuk di dalamnya dan umumnya bersifat padat karena air bekas tidak termasuk didalamnya.

Pencemaran yang paling nampak dan besar adalah produksi limbah padat. Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya dalam pengelolaannya. Tidak hanya manusia yang terancam dengan bahaya sampah tetapi juga mempengaruhi lingkungan kehidupan dapat mengalami kerusakan. Jika sampah sangat mengganggu, mungkin itu juga dikarenakan salah manusia itu sendiri, karena terkadang manusia juga kurang arif dalam memperlakukannya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaat lagi. Sehingga mereka membuang sampah di sembarang tempat dan seenaknya saja . Maka dibuatlah aturan tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Peraturan daerah No 06 Tahun 2017.

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, hingga ketentuan pidana. Berikut penjelasannya:

#### 1) Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awal mengapa dibentuknya Peraturan Daerah tersebut. Dalam pertimbangan Perda Nomor 06 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

#### 2) Ruang Lingkup Peraturan

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan pengelolaan sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asas tanggung jawab, atau berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

3) Kewajiban

Setiap orang atau badan berkewajiban:

- a) Mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.
- b) Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah.
- c) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

4) Larangan

Setiap orang atau badan dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusakan lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah selokan got, saluran , jalan umum, tempat umum, trotoar dan ditempat umum lainnya.

5) Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa:

- a) Teguran/Peringatan
- b) Penyegehan
- c) Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.

6) Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 44 yang menjelaskan tentang larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan di tempat umum lainnya dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 pasal 19 bagian kedua dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah. Ini diperjelas kembali dalam pasal berikutnya yaitu pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan:<sup>57</sup>

- a) pembatasan timbulan sampah;
- b) pendaaur ulang sampah;
- c) pemanfaatan kembali sampah.

Dalam pasal 20 Ayat (2) menjelaskan dalam hal pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:<sup>58</sup>

- a) pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b) fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Selanjutnya penanganan sampah dalam peraturan daerah No 06 Tahun 2017 dijelaskan dalam pasal 21, dalam pasal tersebut menjelaskan penanganan sampah dilakukan dengan cara:<sup>59</sup>

- a) pewadahan dan pemilahan;
- b) pengumpulan;
- c) pengangkutan;
- d) pengolahan; dan

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 20 ayat 1

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, pemilahan dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya.<sup>60</sup>

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan cara:<sup>61</sup>

- a. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;
- b. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan

d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA. Pengolahan sampah disini adalah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan<sup>62</sup>

Bagian terakhir adalah pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.<sup>63</sup>

Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat enam fungsi elemen yaitu timbulan sampah, penanganan sampah pada sumber, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan pemindahan dan pengangkutan, serta pembuangan.

---

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

## B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Seperti penelitian Muhammad Sa'dulah yang berjudul "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)" yang dibuat pada tahun 2017 di Yogyakarta, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara menangani permasalahan sampah yang terjadi di Perkotaan namun yang membedakan dalam penelitian Muhammad Sa'dulah menggunakan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 dan berdasarkan Fikih lingkungan, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kecamatan Bagan Sinembah dan ditinjau dari Fiqh Siyash.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Muhammad Sa'dulah "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya skripsi karya Annisa Suciati dengan judul “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu).<sup>65</sup> dalam skripsi ini membahas secara jelas tentang permasalahan sampah yang terjadi di TPA Sumur Batu yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat setempat seperti timbulnya penyakit kulit hingga gangguan pernafasan. Dalam skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini sama-sama menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di kota-kota besar, dan yang membedakan skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini adalah penulis meninjau dari salah satu aspek hukum islam dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017.

Dengan demikian maka permasalahan sampah yang terjadi di berbagai daerah/kota harus sesegera mungkin untuk diatasi sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi saat ini.

---

<sup>65</sup> Annisa Suciati “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat dan masalah gaji petugas kebersihan nunggu hampir 3 bulan sampai 5 bulan baru keluar gaji, dan di tambahannya peran pemuda setempat untuk ikut berpartisipasi dalam peran membersihkan sampah.
2. Dalam Pandangan *fiqh siyasah* pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bagan Sinembah dalam pandangan islam *Khailfah* pemimpin yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengenai Peraturan Pemerintah Daerah (

PERDA ) No.6 Tahun 2017 di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai syariat islam. Akan tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk ikut berpartisipasi dalam mengadakan gotong royong untuk membersihkan sampah yang merupakan salah satu bentuk kewajiban sesama masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

## B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kecamatan Bagan Sinembah dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten rokan hilir dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan.
2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bagan Sinembah agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok bank sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah
3. Disarankan agar meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qistthi Press, 2015)
- Ashosf Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996)
- Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1,
- Cokro Amidjojo Bintoro, *Teori Strategis Pembangunan Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung,
- Dayat (35 Tahun) Petugas Sampah di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara* 12 Februari 2021
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, *QS.An-nisa ayat 29* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1971).
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kenana, 2003)
- Hendra (27 Tahun) Supir Truck Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara* 11 Februari 2021
- <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 22 mei 2019).
- <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>,
- Ibrahim Jindan Khalid , *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group 2014),
- Irwantoni, "peranan *Siyasah Syar'iyah* dalam Memahami nas-nas Agama". Jurnal Al-
- J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),
- Linda (40 Tahun), Pemilik toko/pedagang bakso Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, *Wawancara* 12 Februari 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Mu'in Salim Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Nahrawi Abdussalam Ahmad Al Indunisi, h. 350.

*Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kabupaten rokan hilir, pasal 4

Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2017, *Tentang Pengelolaan Sampah*, rokan hilir, pasal 6

Peraturan daerah pasal 4 bab III *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Th 2010, *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*

Riduwan, *metode riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Sa'dulah Muhammad "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga 2016.

*Sakinah, Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Wawancara 11 Februari 2021*

Sammuddin, *Rapung Fiqih Demokrasi*, (Jakarta: Gozian Press, 2013),

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Pertama,

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Sofyan (45 Tahun) Petugas Pengelolaan Sampah Kecamatan Bagan Sinembah Kupaten Rokan Hilir, *Wawancara 12 Februari 202*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suciati Annisa “*Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)*” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010),

Sulaiman (29 Tahun) Masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Wawancara 13 Februari 2021

Undang-Undang Dasar RI 1945, Pasal 28 H ayat (1)

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945, alenia ke IV

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Th 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*

Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),

Y.W. Sunindhia, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-2, 1993),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No.06 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)*, yang ditulis oleh :

Nama : **Yodi Sundana**  
 NIM : 11424101258  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**H. Syamsuddin Muir, Lc., MA**

Penguji I  
**Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag**

Penguji II  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1273/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 20 Januari 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YODI SUNDANA  
NIM : 11424101258  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : XIII (Tiga Belas)  
Lokasi : Kecamatan Bagan Sinemba, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOAAN SAMPAH (Studi Pada Dinas kebersihan Kecamatan Bagan Sinemba Kabupaten Rokan Hilir)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38145  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/1273/2021 Tanggal 20 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>YODI SUNDANA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11424101258   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 8 Februari 2021

Kepada Yth.  
Camat Bagan Sinembah  
Kabupaten Rokan Hilir  
di-

Tempat

Nomor 070/Kesbangpol/2021/32  
Sifat Biasa  
Lampiran -  
Perihal Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/38145 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : YODI SUNDANA
2. NIM / KTP : 11424101258
3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH ( STUDI PADA DINAS KEBERSIHAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR)
7. Lokasi : KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  
Konflik



DODI SUHENDRA, S.Sos  
NIP. 19720902 199201 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan untuk tujuan komersial atau tujuan lain yang merugikan.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BAGAN SINEMBAH

JL. LINTAS RIAU – SUMUT  
BAGAN BATU – RIAU 28992

## REKOMENDASI

Nomor : 400/PKM/2021/ 19

### TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRARISSET DAN MENGUMPULKAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Berdasarkan surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 070/Kesbangpol/2021/32 tanggal 08 Februari 2021 perihal Rekomendasi Riset dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : YODI SUNDANA  
NPM : 11424101258  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)"

Lokasi : Kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kantor Camat Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 1 ( satu ) eksemplar.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Dibuat di : Bagan Batu  
Pada Tanggal : 09 Februari 2021



SAKINAH, S.STP. M.Si

Pembina

NIP. 19830624 200112 2 001

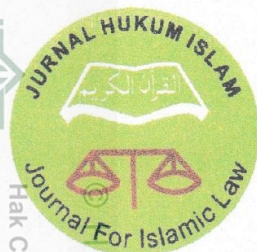
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : YODI SUNDANA  
**NIM** : 11424101258  
**JURUSAN** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**JUDUL** : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Dinas Kebersihan Kecamatan Bagan Sinembah)

**Pembimbing:** Rahman Alwi M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Mr. Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU